

© Sekolah Pascasarjana IPB
Makalah Kelompok 6, sem Ganjil 2004
Materi Diskusi Kelas
Pengantar Falsafah Dains (PPS702)
Program S3
Desember 2004

Posted 9 December 2004

Dosen :

Prof. Dr. Ir. Rudy C. Tarumingkeng (Penanggung Jawab)
Prof. Dr. Zahrial Coto
Dr. Ir. Harjanto, MS

STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI

Disusun Oleh:

Kelompok VI

Edy Supriyadi A165030081 PWD

Askar Jaya A165030051 PWD

A. Mubarak A165030061 PWD

Titing Suharti P062030211 PSL

I. Pendahuluan

Meskipun istilah korupsi sedang populer saat ini, sesungguhnya korupsi bukanlah sebuah fenomena yang baru. Sekitar dua ribu tahun yang lalu, Kautilya, semacam perdana menteri dari suku Indian, telah menulis buku berjudul 'Arthashastra' yang banyak membahas masalah korupsi di masa itu.

Tujuh abad yang lalu, Dante menempatkan para pelaku penyuapan pada bagian paling dasar dari neraka, sekaligus menunjukkan kebencian penduduk abad pertengahan terhadap pelaku dari salah satu jenis korupsi ini. Konstituen Amerika Serikat secara eksplisit menyebutkan kata penyuapan sebagai salah satu bentuk kejahatan yang karenanya seorang presiden bisa mengalami impeachment. Pada tahun 1982, di benua hitam Afrika, Shehu Shagari (Presiden Nigeria waktu itu) mengeluarkan pernyataan tentang korupsi. Ia menjelaskan, bahwa jauh di atas seluruh permasalahan yang muncul di Nigeria, ia sangat mengkhawatirkan dekadensi moral yang terjadi dan muncul dalam bentuk seperti yang ia katakan, " bribery, corruption, lack dedication of the dishonesty, and all such vices". Ternyata, kekhawatirannya memang beralasan, karena setahun kemudian pemerintahan Shehu Shagari mengalami kudeta dari pihak militer dengan "tujuan" membentuk pemerintahan yang bebas dari korupsi.

Korupsi, secara teori bisa muncul dengan berbagai macam bentuk. Dalam kasus Indonesia, korupsi menjadi terminologi yang akrab bersamaan dengan kata kolusi dan nepotisme. Dua kata terakhir dianggap sangat lekat dengan korupsi yang kemudian dinyatakan sebagai perusak perekonomian bangsa. Bahkan sampai MPR merasa perlu mengeluarkan ketetapan (TAP MPR) khusus untuk memastikan penuntasannya dan terakhir dibentuk KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)..

Selain merupakan permasalahan sosial yang sedang trend dibicarakan, korupsi juga mempunyai beberapa alasan untuk menjadi titik perhatian kita. Menurut Vito Tanzi (2000) dalam bukunya, ada beberapa hal yang dapat menjelaskan, mengapa perhatian akan korupsi menjadi hal yang menarik pada saat ini.

Pertama, proses demokrasi yang terjadi di berbagai negara saat ini memberikan peran yang lebih kepada media untuk mengulas dan melakukan investigasi terhadap korupsi. Sesuatu yang sebelumnya dianggap tabu untuk diungkap. Akan tetapi, masyarakat punya hak untuk memperoleh informasi tentang setiap kasus secara lengkap dan detail. Bahkan, media elektronik seperti televisi di Indonesia diperbolehkan meliput langsung persidangan kasus korupsi.

Kedua, proses globalisasi juga meningkatkan hubungan antara satu negara dengan negara yang lainnya, baik negara tersebut bersih dari korupsi ataupun negara tersebut mengalami penyakit korupsi. Hubungan global ini pada akhirnya meningkatkan perhatian dunia internasional terhadap masalah korupsi. Apalagi ketika terlihat bagaimana korelasi positif yang terbentuk antara tingginya tingkat korupsi dengan kehancuran dan lemahnya angka pertumbuhan pada perekonomian sebuah negara.

Ketiga, makin berperannya Lembaga Swadaya Masyarakat dalam mengawasi serta mengontrol pemerintah, antara lain, dalam bentuk gerakan anti korupsi. LSM tersebut melakukan banyak penelitian dan advokasi tentang korupsi. Misalnya Indonesian Corruption Watch (ICW) di Indonesia.

Keempat, tuntutan dari teori ekonomi yang menyatakan bahwa untuk mencapai sebuah proses produksi yang efisien, korupsi sebagai sumber high cost economy dan menyebabkan inefisiensi, harus direduksi.

Fenomena korupsi adalah suatu masalah sosial, sehingga penjelasan mengenainya dapat dilakukan melalui berbagai macam pendekatan ilmu sosial. Secara khusus, tulisan membahas korupsi, dilihat melalui perspektif ilmu ekonomi, mencakup:

1. Motif yang mendorong tindak korupsi, baik langsung maupun tidak langsung
2. Cara mengukur tingkat korupsi
3. Bagaimana korupsi menimbulkan dampak pada perekonomian, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.
4. Dampak korupsi secara lebih spesifik pada perekonomian. Secara lebih spesifik, pengaruh ini akan dilihat efeknya pada pertumbuhan ekonomi.

Empat hal diatas merupakan bahasan utama yang sekaligus merupakan batasan dari tulisan ini. Hal — hal selain yang disebutkan di atas bukan merupakan inti dari tulisan yang penulis sajikan ini. Terakhir, penulis ingin menyajikan kesimpulan, saran dan rekomendasi kebijakan secara teknis mengenai pemberantasan korupsi dalam perspektif ilmu ekonomi di negara ini.

II. Kerangka Teori

2.1 Definisi Korupsi

Korupsi bisa didefinisikan dalam banyak cara, meskipun bisa jadi tiap cara akan mempergunakan kekhususan penjelasan dalam masing-masing aspeknya. Sehingga, jarang kita temui definisi yang cukup lengkap dan sempurna dalam menjelaskan apa itu korupsi.

Definisi yang paling populer dan sederhana adalah definisi yang dikeluarkan oleh World Bank, dimana korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan dari kekuatan jabatan pemerintahan untuk keuntungan pribadi Seperti disebutkan di atas, pendefinisian inipun tidak lepas dari kekurangan. Dari pengertian seperti di atas, maka korupsi yang terjadi di sektor swasta tidak tercakup. Di sisi lain, definisi di atas mengakibatkan penyalahgunaan jabatan publik untuk kepentingan partai, suku, kelas, teman, keluarga dan hubungan lainnya tidak termasuk sebagai tindak korupsi. Padahal, dari contoh korupsi di banyak negara, alokasi dana korupsi paling banyak diperuntukkan untuk membiayai partai politik.

Lebih lanjut, tidak seluruh tindak korupsi berwujud penyuapan. Misalnya, anak sekolah yang izin tidak masuk dengan alasan sakit, namun ia sebenarnya berpergian ke tempat lain adalah juga tindak korupsi. Dari luasnya jenisnya dan macam korupsi ini maka timbul pula kesulitan untuk membedakan antara hadiah dan suap. Pada pembedaan sederhana, penyuapan akan menimbulkan hubungan timbal balik, sedangkan hadiah (seharusnya) tidak. Pada tulisan ini, kami akan memfokuskan pembahasan mengenai korupsi berdasarkan definisi World Bank.

2.2 Faktor - Faktor yang Mendorong Munculnya Korupsi: Faktor Langsung.

Teori Adam Smith mengenai invisible hand banyak mengilhami penelitian mengenai faktor pendorong dan motif tindakan korupsi. Dalam hal ini tindak korupsi dihubungkan dengan peran

monopoli dan pembuatan kebijakan yang diemban oleh pemerintah. Intinya, korupsi merupakan hasil dari buruknya manajemen suatu negara dan akan muncul ketika individu dalam pemerintahan tersebut memiliki kekuatan monopoli yang besar terhadap barang dan jasa, memiliki pengaruh yang kuat pada posisi pengambilan keputusan dan kebijakan, serta system pertanggungjawaban yang buruk dari organisasi pemerintahan tersebut

Hal di atas senada dengan apa yang disampaikan oleh Becker dalam sebuah kolom di The Business Week "If we abolish the state, we abolish corruption". Akan tetapi, tentu saja di zaman modern ini kita tidak akan serta merta membubarkan negara hanya karena keinginan kuat menghancurkan korupsi.

Karena membubarkan negara jelas tidak mungkin, maka yang dilakukan kemudian adalah mengurangi peran pemerintah dalam perekonomian. Untuk tujuan ini, beberapa Negara melakukan proses swastanisasi atau privatisasi. Kenyataan di lapangan membuktikan bahwa beberapa negara dengan indeks korupsi yang rendah (least corrupt countries), seperti Finlandia, Canada, Denmark, Belanda dan Swedia mempunyai proporsi peran public enterprise (baca BUMN) yang besar dalam perekonomian. Hal ini diukur dari tingkat pendapatan pajak dan pembelanjaan negara (public spending) yang cukup besar proporsinya dalam Produk Domestik Bruto (PDB).

Akan tetapi, solusi dari masalah korupsi tidak cukup dengan mengurangi peran Negara dalam perekonomian, namun lebih pada bagaimana negara menjalankan perannya sebagai penyedia jasa sektor publik. Dalam peran inilah kemudian kita akan bisa melihat beberapa aspek dari aktifitas pemerintah yang membuka ruang untuk terjadinya korupsi.

2.2.1. Peran Pemerintah dan Peluang Terjadinya Tindak Korupsi

a. Peran sebagai Regulator dan Pemegang Hak Otorisasi

Secara sederhana, kemungkinan timbulnya tindak korupsi amat terbuka mengingat pemerintah adalah salah satunya pemegang hak penentu dan pembuat kebijakan (regulator) serta otorisasi (mengeluarkan izin) berbagai macam kegiatan ekonomi dan non ekonomi di sebuah negara. Dalam konteks perekonomian, misalnya pendirian perusahaan, pembuatan surat izin mengemudi, mendapatkan passport dan sebagainya. Hak ini adalah hak yang memang harus ada pada pemerintah, akan tetapi menimbulkan peluang tindakan dan perilaku korupsi.

b. Peran sebagai Pengumpul Pajak

Beberapa kondisi umum perpajakan yang menimbulkan peluang terjadinya korupsi:

b1. Hukum dan peraturan perpajakan yang cukup sulit untuk dimengerti dan bisa diartikan berbeda, sehingga mengharuskan pembayar pajak untuk mempekerjakan konsultan pajak.

b2. Gaji atau upah petugas pajak yang relative rendah.

b3. Pengabdian tindak korupsi yang dilakukan oleh petugas pajak, atau susahny membuktikan tindak korupsi yang terjadi, atau hukuman yang ringan atas penggelap pajak.

b4. Peran pemerintah, yang mempunyai wewenang sebagai pembuat keputusan dan kebijakan yang penting seperti penetapan persentase pajak, penunjukan kantor auditor, penentuan hutang pajak dan sebagainya sekaligus pula sebagai pemungut pajak tersebut.

b5. Kontrol yang lemah dari pemerintah.

Hasil penelitian di beberapa negara menunjukkan bahwa permintaan untuk menjadi petugas pajak, walaupun upah yang dibedakan amat rendah, sangatlah tinggi. Ini disebabkan karena para pekerja menganggap adanya peluang untuk mendapatkan “pendapatan” lebih dari peluang peluang korupsi

c. Peran sebagai Penentu Belanja Negara

o Proyek dan Investasi

Peluang korupsi muncul ketika terjadi tender antara pemerintah sebagai pemberi proyek dan perusahaan pelaksana proyek. Akibat dari praktek korupsi ini, penentuan proyek dan perusahaan pemenang tender tidak lagi didasarkan atas kriteria objektif dan perhitungan cost benefit.

o Extra Budget

Dana Jamsostek (jaminan sosial tenaga kerja), dana pensiun, dana bulog adalah beberapa contoh dari extra budget. Pada beberapa negara penerimaan dana bantuan dari luar negeri, penjualan beberapa jenis sumber daya alam seperti minyak dan timah, cenderung tidak dilaporkan secara transparan, sehingga memungkinkan terjadinya korupsi.

d. Penjualan barang dan jasa dengan harga di bawah harga pasar (subsidi).

Beberapa contoh barang dan jasa yang sering disubsidi oleh pemerintah:

- Kredit (contoh untuk Indonesia Kredit Industri Kecil, KCK, dll).
- Listrik.
- Air.
- Perumahan Rakyat (contoh Rumah Sangat Sederhana, dll).
- Pendidikan dan Fasilitas Kesehatan.
- e. Beberapa Aktivitas dan Peraan Pemerintah Lainnya yang membuka peluang terjadinya korupsi.
- Penetapan insentif pajak terutama pajak perdagangan dalam negeri.
- Pemberian hak Pengolahan Hutan (HPH).
- Pemberian hak monopoli kepada investor untuk pengadaan beberapa barang dan jasa tertentu.
- Penjualan aset sektor publik, terutama yang berkaitan dengan pengolahan sumber daya alam.
- Penjualan BUMN dalam bentuk privatisasi.
- Pemilihan pemisahaan untuk memegang hak monopoli dalam ekspor dan impor produk — produk tertentu.

f. Pembiayaan Partai.

Masaiah ini adalah masalah yang krusial. Karena bagaimanapun pihak eksekutif berasal dari partai politik. Dan keterikatan mereka kepada partainya amat memungkinkan terjadinya korupsi terutama untuk mendukung kepentingan partainya.

2.3 Faktor — Faktor Yang Mendorong Munculnya Korupsi Faktor Tak Langsung

a. Kualitas Birokrasi.

Max Weber, seorang sosiolog asal Jerman memberikan ciri sebuah birokrasi yang ideal meskipun, ia sadar, tidak setiap organisasi mampu mencapai keidealan tipe birokrasi ini. Tradisi dan kebanggaan tiap individu akan organisasinya menimbulkan perbedaan pada performance individu tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Di sisi lain, Rauch dan Evans (1997) menyatakan dan hak pendiriannya bahwa rekrutmen tenaga kerja dari suatu organisasi yang mempergunakan standar kepantasan (fit and proper test), akan menghasilkan kemungkinan tingkat korupsi yang rendah.

Hal ini mungkin sulit terjadi di beberapa BUMN tertentu, dikarenakan diperlakukannya BUMN tersebut tidak sebagaimana mestinya, sehingga keputusan menerima pekerja bukan didasarkan atas analisa kebutuhan, melainkan dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi tingkat pengangguran.

b. Tingkat Upah dan Gaji Pekerja di Sektor Publik,

Pada banyak penelitian yang pernah dilakukan selama beberapa waktu, terlihat adanya signifikansi peran tingkat gaji yang diberikan kepada pekerja di sektor publik dengan kemungkinan mereka melakukan tindak korupsi. Contohnya, hasil penelitian yang dilakukan oleh Assar Lindbeck (1998) menunjukkan bahwa rendahnya tingkat korupsi yang terjadi di Swedia pada abad 20-an disebabkan karena pemerintah sebagai pengambil keputusan dan posisi penting dalam publik sektor menerima gaji yang besarnya dua belas sampai dengan lima belas kali gaji rata — rata pekerja di sektor industri.

Namun, harus diakui pula bahwa dalam posisi gaji yang tinggi tidak menjamin hilangnya tindak korupsi sama sekali. ini bisa didekati dengan penjelasan ilmu sosial lainnya, bahwa secara psikologis dan moral, individu selalu menghadapi penawaran untuk mendapatkan suap dan korupsi dalam nilai yang jauh lebih besar daripada gajinya.

Kesimpulan di atas diperkuat pula oleh penelitian yang dilakukan oleh Rijekeghem & Weder (1997) dan UI Haque & Sahay (1996). Ada beberapa hal lain dan hasil penelitian mereka, bahwa peningkatan yang luar biasa besar pada tingkat gaji secara signifikan mampu menekan korupsi, namun pada saat yang bersamaan memberikan beban anggaran yang luar biasa pada pembelanjaan negara.

Beberapa negara, seperti Argentina dan Peru, telah mengadopsi sistem ini dengan memberikan tingkat gaji yang cukup tinggi pada petugas administrator pajak. Singapura juga melakukan hal serupa pada pegawai negeri setingkat menteri dan jabatan tingkat tinggi lainnya, sehingga gaji pegawai negeri di Singapura secara rata rata masuk pada tingkat yang tertinggi di dunia.

Namun, kebijakan dengan tipe seperti ini juga menimbulkan peluang korupsi yang besar. Peluang tersebut muncul sebagai konsekuensi logis dan opportunity cost yang amat tinggi (karena pendapatan yang tinggi) ketika kehilangan pekerjaan tersebut. Sehingga, usaha untuk mendapatkan posisi tersebut serta mempertahankannya memberikan peluang terjadinya korupsi

d. Sistem Hukuman

Menurut analisa dari Gaty Becker (1968), pemberian hukuman yang berat pada pelaku tindak korupsi dapat mengurangi insentif seseorang untuk melakukan korupsi. Kebijakan ini membutuhkan kondisi perundang-undangan dan penegakan hukum yang kuat pada suatu negara.

Sebagaimana sub faktor sebelumnya, tindakan preventif melalui peneraan hukuman juga memberikan peluang korupsi, dengan tujuan untuk menghindari hukuman. Beberapa contoh juga

menunjukkan sulitnya pemberian hukuman pada kasus tindak korupsi dengan motif politik. Keadaan seperti ini akhirnya mengakibatkan publik cenderung memperhatikan kasus-kasus korupsi besar saja dan cenderung mentolerir kasus korupsi kecil. Pada akhirnya, hal ini malah menimbulkan insentif pada individu untuk melakukan korupsi.

e. Kontrol yang dilakukan oleh institusi

Sekali lagi menurut Gaiy Becker, tindakan preventif yang cukup efektif dalam mencegah terjadinya korupsi adalah dengan memperkuat sistem kontrol internal institusi tersebut. ini bisa dilakukan dengan menempatkan pengawas yang jujur, auditor yang bersih, serta sebuah peraturan yang jelas bagi budaya perusahaan.

Beberapa negara seperti Singapura, Hongkong, Uganda dan Argentina juga telah membentuk komisi anti korupsi. Komisi itu lahir untuk menjamin sebuah kinerja yang baik, karenanya komisi haruslah mempunyai independent secara politik dengan eksekutif pemerintahan, serta mempunyai integritas yang tinggi. Sayangnya, di beberapa negara, komisi anti korupsi ini harus melaporkan kinerja dan laporannya kepada presiden, yang seharusnya akan lebih efektif dan independen bila pelaporan itu diberikan kepada badan legislatif seperti Dewan Perwakilan Rakyat.

f. Transparansi dan Kejelasan Peraturan, Perundang-Undangan, dan Proses.

g. Contoh dan komitmen yang baik dari para pemimpin.

2.4 Pengukuran Korupsi

Jika korupsi dapat diukur, maka akan ada kemungkinan untuk menguranginya. Namun pada kenyataannya, secara konseptual, selalu terdapat ketidakjelasan dalam menentukan besaran yang harus diukur. Jika pengukuran hanya dilakukan pada besaran suap yang dibayarkan, maka ini berarti terjadi pengabdian terhadap bentuk-bentuk korupsi sebagaimana telah disebutkan sebelumnya pada bagian pendahuluan di atas. Mengingat, secara langsung, amat sulit ditemukan cara untuk melakukan pengukuran korupsi, maka terdapat beberapa cara tidak langsung untuk mendapatkan informasi tentang tindak korupsi. Beberapa cara untuk mendapatkan informasi mengenai korupsi:

a. Laporan mengenai korupsi melalui surat kabar dan institusi independen misalnya lewat internet.

b. Studi kasus mengenai korupsi di sebuah institusi, walaupun kadang — kadang laporan dari studi kasus cenderung untuk pelaporan internal dan rahasia.

c. Survey dengan menggunakan kuisioner. Cara ini bisa dilakukan secara langsung ke institusi yang hendak diteliti (seperti dalam kasus Peru dan Argentina, studi dilakukan kepada petugas dan administrator pajak), atau secara keseluruhan dalam satu negara. Hasil dari survey ini berupa tingkat persepsi terhadap korupsi, dan bukan angka nominal tindak korupsi. World Bank, IMF dan negara — negara pemberi bantuan keuangan biasanya menyertakan survey seperti ini dalam setiap program bantuannya. Pada beberapa negara seperti Tanzania, Uganda, India, Ukraina dan beberapa yang lain, cara ini cukup memberikan hasil yang memuaskan. Survey bisa dilakukan dalam berbagai bentuk, misalnya survey mengenai Global Competitiveness Report (Jenewa), Political and Economic Risk (Hongkong), International Transparency (Berlin), Political Risk Service (Syracuse), dsb.

Hasil dari berbagai macam survey di atas, telah dipergunakan secara luas bank oleh peneliti maupun pelaku bisnis. Yang harus dihindari adalah kebingungan akan penggunaan ukuran - ukuran korupsi yang dihasilkan. Harus diperhatikan, bahwa indeks yang dihasilkan dari survey - survey tersebut merefleksikan persepsi masyarakat tentang korupsi, bukan pengukuran kuantitatif dari korupsi yang dilakukan.

Negara - negara di dunia mempunyai kecenderungan untuk mempunyai posisi yang relatif stabil dalam persepsi masyarakat mengenai korupsi dalam negara tersebut. Beberapa perubahan posisi yang cukup signifikan salah satunya ditunjukkan oleh Chili. Muncul pertanyaan penting, seberapa akurat perubahan dalam indeks ini menurut perubahan riil yang terjadi di lapangan? Tidak selalu akurat. ini disebabkan pengukuran ini menunjukkan tingkat persepsi, maka bisa saja walaupun hanya terjadi satu kasus korupsi, namun karena terus diberitakan oleh media, maka terjadi perubahan cukup signifikan dalam persepsi masyarakat terhadap korupsi. ini menjadikan pengukuran berdasarkan indeks persepsi tidak membedakan ukuran yang tepat terhadap korupsi yang terjadi di suatu negara.

2.5 Efek korupsi pada perekonomian: Efek Kualitatif

Korupsi mengurangi pendapatan dari sektor publik dan meningkatkan pembelanjaan pemerintah untuk sektor publik. Korupsi juga memberikan kontribusi pada nilai defisit fiskal yang besar, meningkatkan income inequality, dikarenakan korupsi membedakan kesempatan individu dalam posisi tertentu untuk mendapatkan keuntungan dari aktivitas pemerintah pada biaya yang sesungguhnya ditanggung oleh masyarakat. Ada indikasi yang kuat, bahwa meningkatnya perubahan pada distribusi pendapatan terutama di negara - negara yang sebelumnya memakai sistem ekonomi terpusat disebabkan oleh korupsi, terutama pada proses privatisasi perusahaan negara. Lebih lanjut korupsi mendistorsi mekanisme pasar dan alokasi sumber daya dikarenakan:

- a. Korupsi mengurangi kemampuan pemerintah untuk melakukan perbaikan dalam bentuk peraturan dan kontrol akibat kegagalan pasar (market failure). Ketika kebijakan dilakukan dalam pengaruh korupsi yang kuat maka penerapan peraturan dan kebijakan, misalnya, pada perbankan, pendidikan, distribusi makanan dan sebagainya, malah akan mendorong terjadinya inefisiensi.
- b. Korupsi mendistorsi insentif seseorang, dan seharusnya melakukan kegiatan yang produktif menjadi keinginan untuk merealisasikan peluang korupsi dan pada akhirnya menyumbangkan negatif value added.
- c. Korupsi menjadi bagian dari welfare cost memperbesar biaya produksi, dan selanjutnya memperbesar biaya yang harus dibayar oleh konsumen dan masyarakat (dalam kasus pajak), sehingga secara keseluruhan berakibat pada kesejahteraan masyarakat yang turun.
- d. Korupsi mereduksi peran fundamental pemerintah (misalnya pada penerapan dan pembuatan kontrak, proteksi, pemberian property rights dan sebagainya). Pada akhirnya hal ini akan memberikan pengaruh negatif pada pertumbuhan ekonomi yang dicapai.
- e. Korupsi mengurangi legitimasi dari peran pasar pada perekonomian, dan juga proses demokrasi. Kasus seperti ini sangat terlihat pada negara yang sedang mengalami masa transisi, baik dari tipe perekonomian yang sentralistik ke perekonomian yang lebih terbuka atau pemerintahan otoriter ke pemerintahan yang lebih demokratis, sebagaimana terjadi dalam kasus Indonesia.

1. Korupsi memperbesar angka kemiskinan. ini sangat wajar. Selain dikarenakan program - program pemerintah sebagaimana disebut di atas tidak mencapai sasaran, korupsi juga mengurangi potensi pendapatan yang mungkin diterima oleh si miskin.

Menurut Tanzi (2002), perusahaan perusahaan kecil adalah pihak yang paling sering menjadi sasaran korupsi dalam bentuk pungutan tak resmi (pungutan liar). Bahkan, pungutan tak resmi ini bisa mencapai hampir dua puluh persen dari total biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan ini amat mengkhawatirkan, dikarenakan pada negara negara berkembang seperti Indonesia, perusahaan kecil (UKM adalah mesin pertumbuhan karena perannya yang banyak menyrap tenaga kerja).

2.6. Efek Korupsi pada Perekonomian Anahsa Ekonometrika

Beberapa tahun terakhir, banyak dilakukan penelitian dengan menggunakan angka indeks korupsi untuk melihat hasilnya pada variabel — variabel ekonomi yang lain. Beberapa hasil penelitian tersebut adalah

- a. Korupsi mengurangi nilai investasi, dan sebagai konsekuensinya, mengurangi pencapaian actual growth dari nilai potential growth yang lebih tinggi. Berkurangnya nilai investasi ini diduga berasal dari tingginya biaya yang harus dikeluarkan dari yang seharusnya. ini berdampak pada menurunnya growth yang dicapai. Studi didasarkan atas analisa fungsi produksi. dimana growth adalah fungsi dari investasi
- b. Korupsi mengurangi pengeluaran pada bidang pendidikan dan kesehatan
- c. Korupsi mengurangi pengeluaran untuk biaya operasi dan perawatan dari infrastruktur
- d. Korupsi menurunkan produktivitas dari investasi publik dan infrastruktur suatu negara
- e. Korupsi menurunkan pendapatan pajak
- f. Korupsi menurunkan Foreign Direct Investment, dikarenakan efek korupsi yang sama dengan efek pajak

III. Analisa Hubungan Korupsi Dengan Kondisi Perekonomian (Tingkat Investasi Publik, Pendapatan Pajak danBiaya Operasional Perawatan)

Bagian ketiga ini menunjukkan dan membahas hasil penetitian empiris yang dilakukan oleh Vito Tanzi (2000) mengenai hubungan antara korupsi dan investasi. Tanzi menggunakan data-data indeks korupsi dari dua sumber, yaitu Business International (BI) dan Political Risk Service (dipublikasikan oleh International Countiy Risk Guide, ICRG) Dua indikator tersebut mengukur derajat korupsi yang terjadi di suatu negara berdasarkan informasi yang diterima oleh peneliti (BI mendapatkan informasi dari jaringan korespondenya, sementara ICRG mendapatkan informasi dari para investor asing). Data BI tidak lagi diperbaharui, sementara data dari ICRG terus diperbarui setiap tahunnya.

Indeks dari BI menunjukkan tingkat keterlibatan transaksi bisnis pada praktek korupsi dan pembayaran biaya yang 'dipertanyakan'. Sementara indeks ICRG mengukur derajat korupsi yang terjadi pada transaksi ekspor impor, kontrol nilai tukar, pengukuran pajak, dan perlindungan polis.

Hasil penelitian yang disajikan akan menunjukkan hubungan antara korupsi, investasi publik, biaya operasi dan pemeliharaan, serta aspek aspek lain dari posisi anggaran pemerintah. Lebih lanjut,

digunakan analisa regresi untuk menguji hipotesis berdasarkan cross-country data tahun 1980 sampai dengan tahun 2000.

3.1 Korupsi dan Investasi Publik

Hipotesa 1: Tingkat korupsi yang tinggi akan berhubungan dengan tingginya investasi publik untuk menguji hipotesis ini, dilakukan regresi terhadap variabel investasi publik. Variabel investasi publik yang menjadi variabel bebas tersebut adalah: indeks korupsi, PDB per kapita riil dan rasio pendapatan pemerintah dari pajak per GDP hasil regresi diperlihatkan pada tabel berikut.

Efek Korupsi pada Investasi Publik

| | |
|--|--------------|
| Variable bebas | |
| Kontanta | 4.71 |
| Indeks Korupsi | 0.48 |
| PDB per Kapita Riil | -1.21 |
| Rasio pendapatan pemerintah thd PDB | 0.13 |
| Probability | 0.207 |
| Observasi | 1000 |

Secara umum, dari hasil regresi bisa didapat kesimpulan, bahwa dengan tingkat signifikansi sebesar satu persen, hipotesa pertama di atas tidak tertolak. Berarti, secara ekonometrik, terdapat hubungan antara tingginya tingkat korupsi dan tingginya tingkat investasi publik. Dengan demikian, investasi publik menjadi titik perhatian dari pemerintah manapun, mengingat adanya korelasi yang positif antara dua hal di atas.

3.2 Korupsi dan Pendapatan Pemerintah

Pada bagian berikut, kita akan melihat sisi pendapatan pemerintah dari pajak.

Hipotesis 2: Tingginya tingkat korupsi berhubungan dengan rendahnya pendapatan pemerintah dari pajak. Seperti di atas, kita akan melakukan regresi terhadap variabel pendapatan pemerintah, untuk kemudian ditambahkan variabel bebas PDB per kapita riil. Hasil yang ditunjukkan dalam tabel berikut menunjukkan hubungan dua variabel di atas dengan tingkat signifikansi sebesar satu persen.

Efek Korupsi pada Pendapatan Pemerintah

| | |
|----------------------------|--------------|
| Variable bebas | |
| Kontanta | 12.9 |
| Indeks Korupsi | -1.71 |
| PDB per Kapita Riil | 3.73 |
| Probability | 0.28 |

| | |
|------------------|-------------|
| Observasi | 1042 |
|------------------|-------------|

3.3 Korupsi dan Pengeluaran Biaya Operasi dan Perawatan (O&M expenditures)

Hipotesa 3 *Ceteris paribus*, tingginya tingkat korupsi berhubungan dengan rendahnya tingkat per biaya operasi dan perawatan. Di sini terdapat keterbatasan data, dimana data operational & Maintenance (O&M) expenditures tidak tersedia. Maka data tersebut diganti dengan data (1) pengeluaran terhadap barang dan jasa lain—lain dan (2) pengeluaran untuk kepentingan upah dan gaji untuk melakukan pengujian terhadap hipotesa ketiga ini, akan dilakukan regresi variabel variabel di atas terhadap PDB per kapita riil.

Selain itu, akan dilakukan juga proses regresi yang mendapatkan tiga hasil regresi untuk kasus tersebut, yakni di level dunia, negara maju dan negara berkembang.

Efek Korupsi pada O & M expenditure dengan variable pengeluaran untuk barang dan jasa

| | World | OECD | Developing |
|----------------------------|--------------|--------------|-------------------|
| Kontanta | 97.2 | 43.4 | 82.3 |
| Indeks Korupsi | 4.44 | 5.96 | 1.43 |
| PDB per Kapita Riil | 0.42 | 0.81 | 0.63 |
| Probability | 0.038 | 0.182 | 0.021 |
| Observasi | 925 | 273 | 652 |

Efek Korupsi pada O & M expenditure dengan variable pengeluaran untuk Upah dan gaji

| | World | OECD | Developing |
|----------------------------|--------------|--------------|-------------------|
| Kontanta | 42.2 | 30.8 | 39.7 |
| Indeks Korupsi | 1.48 | 0.75 | 1.16 |
| PDB per Kapita Riil | -0.48 | -0.65 | -0.0067 |
| Probability | 0.319 | 0.31 | 0.023 |
| Observasi | 925 | 273 | 652 |

Dari hasil regresi terlihat bahwa pada pendekatan pertama, hipotesis ketiga ini tertolak ketika penelitian dilakukan di negara berkembang. Sementara dengan tingkat signifikansi satu persen, hasil regresi di level dunia dan (DECD menunjukkan terpenuhinya hipotesa ketiga (tidak tertolak, yang berarti menunjukkan hubungan). Hipotesa yang tertolak pada kasus negara berkembang mengindikasikan adanya gangguan dalam pilihan data yang dilakukan untuk mendekati variable Q&M expenditures. Namun pada pendekatan kedua, kita melihat bahwa dengan tingkat

signifikansi yang juga sebesar satu persen, hipotesa ketiga terbukti di semua tempat penelitian. Sehingga kita bisa menyimpulkan adanya hubungan antara tingkat korupsi dengan tingkat besarnya pengeluaran biaya operasional dan perawatan.

V. Hasil Kajian:

Langkah - Langkah untuk Mengurangi Korupsi

Dari hasil kajian literatur dan studi hasil penelitian, maka jelas terlihat bahwa korupsi baik secara kualitatif maupun kuantitatif mempunyai efek yang buruk terhadap perekonomian. Namun sebelum dibahas lebih lanjut mengenai langkah langkah penanggulangan korupsi. Perlu diperhatikan bahwa beberapa penelitian menunjukkan keberadaan korupsi pada tingkat tertentu ternyata dapat berdampak pada peningkatan efisiensi, dan tentunya mendorong terjadinya growth yang lebih tinggi,

Pertama kali diteliti oleh Leff (1964) dan Huntington (1968), pendapat mengenai korupsi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi hal yang menarik untuk terus dikaji. Setidaknya ada beberapa alasan yang mendukung pendapat di atas. Antara lain:

Pertama, korupsi berlaku seperti "speed money" (bahasa Indonesia uang pelicin), sehingga adanya suap membuat para pengusaha terhindar dari penundaaan birokrasi. Lui (1985) menunjukkan bahwa strategi suap pada keseimbangan Nash (Nash equilibrium) dalam non cooperative game dapat mengimbangi biaya — biaya yang dapat mengembalikan efisiensi dari para pegawai administrasi.

Kedua, para pegawai struktural yang bergaji rendah akan meningkatkan tanggung jawab dan motivasinya karena pengaruh siap, sehingga hal ini akan berpengaruh pula pada efisiensi.

Ketiga, dilihat dari sisi kesejahteraan, segala macam distorsi yang terjadi di pasar gelap seperti contohnya penyelundupan, mungkin saja dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat ini terjadi dikarenakan masyarakat dapat memiliki barang barang dengan harga yang relatif lebih murah daripada ketika mereka memperolehnya di pasar resmi

Namun beberapa argumen di atas setidaknya berkurang validitasnya ketika Myrdal (1984)

dengan hasil penelitiannya berpendapat bahwa teori speed money yang membantu mempercepat terjadinya proses kesepakatan, pada kenyataannya juga meningkatkan insentif kepada para birokrat untuk memperlambat kerja mereka, dengan tujuan untuk mendapat lebih banyak uang lagi. Lebih lanjut, suap juga meningkatkan biaya biaya transaksi yang pada akhirnya berpengaruh pada harga barang di pasaran. Korupsi juga akan menurunkan efektivitas kebijakan pemerintah di sektor industri karena mendorong para pelaku bisnis untuk melakukan kegiatannya pada sektor yang tidak legal sehingga pemerintah tidak mendapatkan pajak dan hukum yang berlaku diabaikan.

Oleh karena itu, korupsi tetap harus diberantas. Keberadaan korupsi dalam suatu negara akan menghambat negara tersebut bukan saja untuk mencapai perekonomian yang efisien, namun juga pada pembentukan negara yang demokratis.

Mengingat korupsi banyak berawal dari aktivitas ekonomi pemerintah, maka pemberantasan korupsi harus dimulai dari pemerintah. Dengan fokus masalah yang jelas dan usaha yang keras,

dapat dikurangi, walaupun akan sangat sulit untuk mencapai titik nol atau tidak ada korupsi sama sekali.

Usaha pemberantasan korupsi setidaknya harus dimulai dalam empat cara:

- a. Komitmen yang kuat pada para pemimpin
- b. Mengurangi korupsi dari sisi demand

Ini bisa dilakukan dengan cara perlahan-lahan mengurangi keikutsertaan pemerintah dalam aktivitas ekonomi. Peran pemerintah selanjutnya hanya sebagai fasilitator, dan memastikan aktivitas ekonomi berjalan lancar serta meminimalkan terjadinya kegagalan pasar.

- c. Mengurangi korupsi dari sisi supply

Salah satu ciri negara dengan tingkat korupsi yang rendah adalah adanya pelayanan publik yang baik, dimana para pekerja (penyedia jasa publik) digaji dengan jumlah yang cukup baik. Tanzi (2000) mengatakan bahwa memerangi korupsi bukanlah hal yang mudah. Dicontohkan oleh beberapa negara seperti Singapura dan Hong Kong yang memberikan gaji kepada presiden, perdana menteri, menteri, serta posisi penting pada pemerintahan dengan tingkat yang termasuk tertinggi di dunia. Meskipun tidak berarti dengan gaji yang tinggi ini korupsi bakal hilang namun setidaknya insentif dapat menjadi tereduksi.

- d. Meningkatkan Kontrol dan Hukuman.

Setelah ruang dan peluang untuk melakukan korupsi itu direduksi, sesuai dengan langkah-langkah di atas, maka sisa-sisa peluang kemunculan motif untuk melakukan korupsi harus benar-benar — benar-benar dihilangkan dengan cara memberikan kontrol yang ketat serta hukuman yang benar kepada para pelakunya. Negara — negara yang berhasil melakukan pemberantasan korupsi seperti Singapura dan Hong Kong, membentuk Biro Investigasi Khusus untuk memberikan kontrol dan pengusutan atas segala macam dugaan korupsi. Tim haruslah dibentuk sedemikian rupa, sehingga bebas dari pengaruh dan tekanan politik mempunyai integritas diberikan gaji yang tinggi untuk menghindari dari pengaruh suap. Selanjutnya perlu ditegaskan adanya penegakan hukum kepada siapapun yang terbukti melakukan korupsi, sehingga kerja keras tim investigasi menjadi tidak sia-sia.

V. Kesimpulan, Saran dan Rekomendasi Kebijakan

5.1. Kesimpulan

Ditinjau dari sudut apapun, korupsi sama sekali tidak memberikan manfaat. Baik kepada perekonomian, maupun kepada sistem demokrasi politik yang baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara dalam masa transisi seperti Indonesia, baik dari sistem ekonomi (dari sistem ekonomi terpusat menuju sistem ekonomi yang lebih menganut pasar) maupun dari sistem politik dan demokrasi (pemerintahan yang otoriter ke pemerintahan yang demokratis), selalu mengalami masalah korupsi yang luar biasa besar. Bahkan, saat ini sudah terbangun mitos di masyarakat bahwa korupsi hampir mustahil dapat dibasmi, karena ada anggapan bahwa korupsi telah menjadi kebudayaan kita. Namun hal ini tidak bisa dijadikan justifikasi dan apologi untuk terus bersikap toleran dan permisif terhadap keberadaan korupsi.

Dari hasil penelitian Farah Dewi (2002), ada hal yang menarik berkaitan dengan pemberantasan korupsi ini. Menurutnya, jika Indonesia sanggup menekan tingkat korupsinya sampai serendah tingkat korupsi di Jepang, maka dengan performa ekonomi seperti sekarang, Indonesia dapat

mencapai tingkat pertumbuhan sebesar 6.37% setahun. Lebih lanjut, jika Indonesia sanggup menekan tingkat korupsinya hingga serendah tingkat korupsi Singapura, maka Indonesia akan mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 10.68% per tahun. Maka mutlak sudah, bahwa pemberantasan korupsi adalah bagian yang tak terpisahkan dari proses perbaikan ekonomi Indonesia. Karena berdasarkan analisa apapun, korupsi tidak mungkin ditolerir.

Tentu akan sangat membingungkan bila kita harus menyelesaikan semua kasus korupsi karena sangat banyaknya kasus korupsi di negeri ini. Oleh karena itu pemetaan korupsi dengan memberilkan prioritas menjadi penting. Tolak ukur yang paling penting adalah seberapa jauh korupsi tersebut berkaitan dengan kepentingan umum dan merugikan keuangan negara.

Kita dapat menemukan suatu pola umum dari korupsi yang terjadi di Indonesia, namun bukan tidak mungkin setiap daerah dan setiap kasus memiliki kekhususannya sendiri. Beberapa hal bisa dijadikan alasan bagi tumbuhnya perbedaan-perbedaan ini seperti perbedaan sumber daya ekonomi (atau pendapatan), budaya, kondisi kelompok-kelompok sosial, yang kesemuanya mempengaruhi pola-pola korupsi dan upaya pemberantasannya. Yang pasli, kita harus segera bergerak menuntaskan serta melakukan perubahan.

5.2. Saran dan Rekomendasi Kebijakan

Pembangunan di Indonesia tidak boleh terkoyak hanya karena ulah oknum yang tidak bertanggungjawab (walaupun esok mereka pasti akan mempertanggungjawabkan perbuatannya pada mahkamah tertinggi di akhirat) yang melakukan abuse of power. Oleh karena itu, ada beberapa hal teknis yang kami sarankan sebagai rekomendasi kebijakan bagi pemerintah Indonesia, yakni:

Komitmen yang kuat dari para pemimpin adalah kunci, karenanya pada setiap proses pemilihan presiden atau pejabat apapun, agar dilakukan dengan fit proper test yang harus sangat memperhatikan Si moralitas,

Pemerintah secara perlahan-lahan harus mulai mengurangi keterlibatan para aktivitas ekonomi. Mungkin sangat neoklasik, tapi itulah yang mesti dilakukan jika berkaca pada Finlandia dan negara lain yang mampu meng-nol-kan potensi korupsinya. Peran pemerintah selanjutnya adalah menjadi 'polisi pasar' atau menjadi 'wasit dunia usaha' yang memastikan aktivitas ekonomi berjalan lancar serta meminimalkan terjadinya kegagalan pasar.

Secara perlahan-lahan pemerintah harus mulai melakukan rasionalisasi pegawai dalam jumlah yang cukup signifikan dan memastikan standar gaji yang bersaing dengan swasta. Akan tetapi, antisipasi akibat dan kebijakan pengurangan pegawai ini juga mesti disiapkan.

c Menghukum koruptor dengan hukuman yang seberat-beratnya. Mungkin Korea Selatan bisa dicontoh dalam hal ini

d Memaksimalkan peran KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sebagai pengawas yang jujur dan auditor yang bersih dalam melakukan peran kontrol dan pengusutan atas segala macam dugaan korupsi

c Secara bertahap dan berkelanjutan pemerintah harus mengupayakan terlaksananya aturan yang sudah diciptakan namun harus dilaksanakan. Yakni:

o TAP MPR No. XIJMPRI1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN.

o UU No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN.

- o UU no. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU anti Korupsi).
- o Komisi Pemberantasan Korupsi (Anti Corruption Commission).

Daftar Pustaka

- Aminur Rahman, Gregory Kisunko & Kapil Kapoor. "Estimating the Effect of Corruption Implication for Bangladesh" World Bank Report, Th. 2000.
- Becker, Gary S (1968), "Crime and Punishment: An Economic Approach", *Journal of Political Economy*, 76(2) (March/April), 162—217.
- Farah Dewi, Siti Nurfitriah, "Analisis Pengaruh Korupsi terhadap Pertumbuhan, Investasi Domestik dan FDI", Tesis, Program Pasca Sarjana UI, Depok 2002.
- Klitgaard, Robert E (1991), "Controlling Corruption", Berkeley: University of California Press.
- Lindsey, Tim and Dick, Howard, "Corruption in Rethinking the Governance Paradigm", The Federation Press, Australia, 2002.
- Noohan, John T. Jr. (1984), "Bribes", New York: McMillan.
- Subiman, Nina LL., "Link Between Firm Characteristics, Bribery, And Illegal Logging in Indonesian Plywood and Sandwood Firms", Tesis, Program Pasca Sarjana UI, Depok, 2002.
- Shleifer, Andrei and Robert W. Vishny (1993), "Corrupt", *Quarterly Journal of Economics*, 108(3) (August), 559 —617.
- Tanzi, Vito, "Policies, Institutions and The Dark Side of Economics", Edward Elgar Publishing Limited, UK, 2000.
- Nadeem and Ratna Sahay (1996), "Do Government Wages Cuts Close Budget Deficits? Cost of Corruption", *IMF Staff Paper*, 43 December, 754—78.
- Van Rijckghem, Caroline and Beatrice Weder (1997), "Corruption and the Rate of Temptation Do Low Wages in Civil Service cause Corruption?", *IMF Working Paper*, WP/97/73 (June).
- Weber, Max (1974), "The Theory of Social and Economic Organization", London: The Free Press of Glencoe.
- Wei, Shang — in (1997a), "How Taxing is Corruption on International Investors", NBER Working